

JURNAL APARATUR

**EVALUASI PENERAPAN PDCA *CYCLE* PADA PROGRAM
PELATIHAN DASAR DALAM MENGHADAPI RE-AKREDITASI**

**MODEL PERILAKU TRANSFER HASIL PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA: SEBUAH
PENERAPAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR***

**STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL DALAM MENINGKATKAN
KINERJA WIDYAISWARA**

**OPTIMALISASI PEMBUDAYAAN GERAKAN ANTI KORUPSI
DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

**PEMBELAJARAN JARAK JAUH PELAYANAN PRIMA PADA
MASA PANDEMI COVID-19**



**JURNAL
APARATUR
KESDM**

VOLUME 5

NOMOR 2

**BANDUNG
2021**

**HALAMAN
80-161**



OPTIMALISASI PEMBUDAYAAN GERAKAN ANTI KORUPSI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Zulkifli

Widyaiswara PPSDM Aparatur

ABSTRACT

The Anti-Corruption Movement is a movement that remains relevant to be promoted, especially since there are still many perpetrators who have been caught red-handed (OTT) by law enforcement officials (KPK). This study intends to reveal the relationship between two variables, namely the Culture of the Anti-Corruption Movement in Corruption Prevention and the locus in the PPSDM Aparatur. This study aims to determine the process of anti-corruption culture and the process of preventing corruption in the prevention of corruption in the PPSDM apparatus. This study uses a quantitative approach with an explanative method, the type of data is quantitative, the sample is determined based on the Slopin method with data collection techniques through a questionnaire, while the data analysis uses descriptive analysis, validity and reliability tests and correlation analysis. The hypothesis of this research is that the more optimal the culture of the anti-corruption movement is, the more effective the prevention of corruption is in the PPSDM Aparatur, which means that there is a positive relationship between the variables of the culture of the anti-corruption movement and the variable of preventing corruption.

ABSTRAK

Gerakan Anti Korupsi menjadi gerakan yang tetap relevan untuk digalakkan terlebih masih banyaknya pelaku yang tertangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum (KPK). Penelitian ini hendak mengungkap hubungan yang terjadi antara dua variabel yaitu Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dalam Pencegahan Korupsi dengan lokus di PPSDM Aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pembudayaan Anti Korupsi dan proses pencegahan korupsi dalam Pencegahan Korupsi di PPSDM Aparatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatif, jenis datanya kuantitatif, sampel ditentukan berdasarkan metode Slopin dengan teknik pengumpulan data melalui angket/kuesioner sedangkan analisis data dengan melakukan analisis dekriptif, uji validitas dan realibilitas serta analisis korelasi. Adapun hipotesis penelitian ini adalah semakin optimal pembudayaan gerakan anti korupsi maka semakin efektif pencegahan korupsi di PPSDM Aparatur yang berarti terdapat hubungan positif antara variabel pembudayaan gerakan anti korupsi dengan variabel pencegahan korupsi.

ARTICLE HISTORY

Submitted: 08/07/2021

Accepted: 28/08/2021

Published: 31/08/2021

KEYWORDS

Pembudayaan, Pencegahan,
Anti Korupsi, Korupsi

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Di era reformasi ini tekad pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) sering didengungkan, dan disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang telah lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal itu, maka terlebih dahulu korupsi dalam segala bentuknya harus diberantas dan ditanggulangi, sehingga korupsi tidak merajalela. Pemerintahan yang bisa mengendalikan korupsi adalah pemerintahan yang kuat, bersih, terbuka, pemimpin yang tidak otoriter, menegakkan supremasi hukum, dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat (Arsyad & Mh, 2002).

Bahwa penanggulangan korupsi telah membuahkan hasil berupa timbulnya budaya takut pada sebagian birokrat untuk melakukan korupsi, tercermin dari sikap hati-hati pada pelayanan publik, meski hal ini bukan menjadi tolak ukur bahwa korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia, karena pada kenyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan semakin menurun (rendah).

Dalam upaya memberantas korupsi di instansi pemerintah, dengan diterbitkannya PermenPanRB nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur telah mendapatkan predikat sebagai Instansi yang telah menerapkan Wilayah Bebas Korupsi dan selanjutnya berupaya untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Namun masih terdapat kendala dalam menerapkan budaya gerakan anti korupsi dalam Pencegahan Korupsi di PPSDM Aparatur, antara lain:

- a. Belum didatakannya predikat WBBM.
- b. Kurangnya program kampanye anti korupsi.
- c. Belum terdapatnya ketentuan yang tegas dan keras mengenai penindakan terhadap pelanggaran anti korupsi.
- d. Belum tegasnya keberadaan fungsi organisasi dalam mewujudkan pembudayaan gerakan anti korupsi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh PPSDM Aparatur tersebut harus segera diatasi dan dicarikan solusinya, jika ingin tetap mempertahankan predikat WBK terlebih lagi untuk mendapatkan predikat WBBM.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, masalah utama yang akan diteliti adalah “Bagaimana membangun budaya anti korupsi dalam rangka penanggulangan korupsi di PPSDM Aparatur”.

c. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui proses Pembudayaan Anti Korupsi dalam Pencegahan Korupsi di PPSDM Aparatur.
2. Mengetahui proses pencegahan korupsi di PPSDM Aparatur.
3. Mengetahui korelasi antara pembudayaan anti korupsi dengan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan pencegahan anti korupsi di PPSDM Aparatur.

d. Manfaat

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi bagi pegawai dan pimpinan dalam meningkatkan/Optimalisasi Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi di PPSDM Aparatur;
2. Memberikan informasi kepada pengambil keputusan di PPSDM Aparatur untuk memecahkan masalah terkait pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi di PPSDM Aparatur dalam mempertahankan WBK serta mewujudkan WBBM.

KERANGKA TEORI

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprillani Arsyad, SH. MH., dengan Judul Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Pembudayaan Anti Korupsi dengan Pencegahan Korupsi. Dalam penelitian ini juga ditemukan hubungan yang erat antara dua variabel tersebut. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis adalah dengan lokus di PPSDMA terdapat korelasi yang kuat sebagaimana hasil pembahasan pada bagian akhir dari tulisan ini.

Beberapa teori yang digunakan oleh penulis dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pembangunan Budaya/pembudayaan

Proses pembudayaan adalah tindakan yang menimbulkan dan menjadikan sesuatu lebih bermakna dengan melakukan pembiasaan kegiatan yang diakui bernilai baik untuk kemanusiaan.

Proses tersebut diantaranya:

1. Internalisasi
2. Sosialisasi
3. Enkulturasasi adalah pencemplungan seseorang kedalam suatu lingkungan kebudayaan
4. Difusi : Meleburnya suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain

5. Akulturasi : percampuran dua atau lebih kebudayaan
6. Asimilasi : proses peleburan dari kebudayaan satu kekebudayaan lain.

b. Teori mind set dalam mengubah suatu kebiasaan

Teknik mengubah mindset untuk mencapai tujuan yang diinginkan:

1. Ubahlah kebiasaan yang lama
2. Fokuslah kepada hal yang positif dan hilangkanlah pikiran negatif
3. Pilihlah cara positifnya
4. Berhentilah bergaul dengan penentang
5. Berhati-hatilah terhadap apa yang diucapkan
6. Hadapilah ketakutan yang menghadang dan jangan melihat kebelakang.

Partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Korupsi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, dilakukan baik oleh kalangan atas (elit) di pusat dan daerah, maupun oleh kalangan bawah (pegawai rendahan), seperti dalam pembuatan KTP, SIM dan berbagai macam perizinan.

Agar penanggulangan korupsi efektif dan efisien, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebabnya. Menurut Syed Hussein Alatas (1986:46), faktor-faktor penyebab korupsi adalah:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindakan hukum yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- j. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ahmad Ubbe, 2007) :

- a. Kerugian uang negara;
- b. Suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;

- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- g. Gratifikasi.

Indikator Pembudayaan anti korupsi yaitu dengan melakukan kegiatan pembiasaan dalam hal sebagai berikut:

1. Menghilangkan Kegiatan yang merugikan Keuangan Negara;
2. Menghilangkan Suap-menyuap;
3. Menghilangkan Penggelapan dalam jabatan;
4. Menghilangkan Pemerasan;
5. Menghilangkan Perbuatan curang;
6. Menghilangkan Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Menghilangkan/melaporkan Gratifikasi
8. Memiliki integritas dan moral yang tinggi
9. Mengikuti Pendidikan baik formal maupun non formal Anti Korupsi
10. Melakukan kampanye anti korupsi
11. Melaporkan Harta Kekayaan
12. Melakukan Penegakan sanksi/hukum terhadap pelaku korupsi.

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pencegahan korupsi adalah United Nations Convention against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003.

Model kebijakan pencegahan (preventif) terhadap korupsi tersebut merupakan indikator pencegahan korupsi dalam penelitian ini berupa:

1. pembentukan badan (unit kerja/tim kerja) anti-korupsi;
2. peningkatan transparansi dalam pembiayaan;
3. promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
4. rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
5. adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
6. transparansi dan akuntabilitas keuangan;
7. penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai yang korup;
8. dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan korupsi;
9. promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
10. untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari seluruh komponen;

11. meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi.
12. melaporkan dan hal-hal lain yang dapat dilakukan saat mengetahui telah terjadi korupsi.

Pusat PPSPDM Aparatur berupaya untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi pada semua tingkatan dan melakukan kampanye anti korupsi dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan korupsi. Dengan demikian diharapkan suatu saat nanti timbulnya budaya malu (bukan takut) melakukan korupsi dan budaya anti terhadap perbuatan korupsi.

❖ **Hipotesis**

Berdasarkan kajian teori bahwa semakin Optimal Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi maka semakin efektif Pencegahan Korupsi di PPSPDM Aparatur.

Terdapat hubungan positif antara variable pembudayaan gerakan anti korupsi dengan variabel pencegahan korupsi.

$H_0 : p \leq 0$, hal ini berarti bahwa Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi tidak berhubungan atau berhubungan negatif dengan Upaya Pencegahan Korupsi

$H_a : p > 0$, hal ini berarti bahwa Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi berhubungan atau berhubungan positif dengan Upaya Pencegahan Korupsi.

METODE PENELITIAN

Bagian ini terdiri atas langkah-langkah atau prosedur penelitian, isinya terutama mencakup:

- a. Pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.
- b. Jenis data kuantitatif, sumber data primer bersumber dari responden/subjek pegawai PPSPDM Aparatur (PNS dan PTT) yaitu data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah.
- c. Adapun sample dalam penelitian berdasarkan metode Slovin.
Secara Matematis, Rumus Slovin yang kita gunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut :
$$n = N / (1 + N.(e)^2)$$
- d. Teknik Pengumpulan Data melalui angket (kuesioner)
Teknik Analisis Data adalah analisis korelasi yang merupakan suatu Teknik Statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 2 Variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara 2 Variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara 2 variabel

yang dimaksud disini adalah apakah hubungan tersebut ERAT, LEMAH, ataupun TIDAK ERAT sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya Linear Positif ataupun Linear.

e. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dalam Pencegahan Korupsi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 dianalisis dengan menggunakan software SPSS Versi 25 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dalam Pencegahan Korupsi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 dianalisis dengan menggunakan software SPSS Versi 25 Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut:

A. Analisis Deskriptif

Pada bagian ini akan diberikan analisis deskripsi terhadap jawaban 61 (enam puluh satu) responden untuk variabel Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi (X) dan Variabel Pencegahan Korupsi (Y). Jumlah pertanyaan dari 2 (dua) variabel tersebut sebanyak 50 (lima puluh delapan) pertanyaan dengan rincian yaitu 34 (tiga puluh empat) pertanyaan variabel X dan sebanyak 24 (dua puluh empat) pertanyaan variabel Y. Jadi total pertanyaan yang dijawab dikali jumlah responden adalah:

$$50 \times 61 = 3.050$$

Adapun jawaban dari pertanyaan responden menggunakan skala Likert 1 s.d. 5 dengan rincian: 1. Tidak Setuju; 2. Kurang Setuju; 3. Agak Setuju; 4. Setuju; 5. Sangat Setuju. Dengan hasil sebagaimana tabel 1.

Tabel 1
Hasil Analisis Data

	Jawaban Responden					Total
	Sangat Setuju (5)	Setuju (4)	Agak Setuju (3)	Kurang Setuju (2)	Tidak Setuju (1)	
Jumlah	1484	1502	364	82	106	3538
Persentase	42 %	43 %	10 %	2 %	3 %	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan jawaban pertanyaan, sebagian besar didominasi oleh jawaban Sangat Setuju (42 %) dan Setuju (43 %).

Hal tersebut berarti di PPSDM Aparatur diperlukan suatu pembudayaan anti korupsi yaitu dengan melakukan kegiatan pembiasaan yang merupakan indikator pembudayaan anti korupsi dalam hal:

1. Menghilangkan Kegiatan yang merugikan Keuangan Negara;
2. Menghilangkan Suap-menyuap;

3. Menghilangkan Penggelapan dalam jabatan;
4. Menghilangkan Pemerasan;
5. Menghilangkan Perbuatan curang;
6. Menghilangkan Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Menghilangkan/melaporkan Gratifikasi
8. Memiliki integritas dan moral yang tinggi
9. Mengikuti Pendidikan baik formal maupun non formal Anti Korupsi
10. Melakukan kampanye anti korupsi
11. Melaporkan Harta Kekayaan
12. Melakukan Penegakan sanksi/hukum terhadap pelaku korupsi,

dari penelitian diperoleh juga hasil bahwa diperlukan indikator pencegahan korupsi berupa:

1. pembentukan badan (unit kerja/tim kerja) anti-korupsi;
2. peningkatan transparansi dalam pembiayaan;
3. promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
4. rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
5. adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
6. transparansi dan akuntabilitas keuangan;
7. penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai yang korup;
8. dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan korupsi;
9. promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
10. untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari seluruh komponen;
11. peningkatan kesadaran (*awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi.
12. melaporkan dan hal-hal lain yang dapat dilakukan saat mengetahui telah terjadi korupsi.

B. Analisis Uji Reabilitas dan Uji Validitas

1. Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Pembudayaan Anti Korupsi

Realibilitas (keandalan) suatu alat ukur dapat di uji dengan skor yang dihasilkan relatif sama pada semua responden, walaupun responden tersebut mengerjakannya dalam waktu berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha atau Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Hasil pengujian reabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Uji Reliabilitas Variabel Pembudayaan Anti Korupsi

Tabel 2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.988	36

Dari hasil pengujian realibilitas ini dengan *Cronbach's Alpha* untuk semua atribut yaitu $r > 0.9$, artinya kuesioner tersebut reliabel dengan nilai reliabilitas kuesioner yang tinggi karena berada pada range 0.8-1.0. hal ini membuktikan bahwa kuesioner yang disebarkan dapat diandalkan untuk dijadikan alat ukur dalam penelitian ini.

b. Uji Validitas Variabel Pembudayaan Anti Korupsi

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat mewakili obyek yang diamati. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Korelasi Product Moment* dan hasilnya akan dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi r . Uji coba kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui apakah butir pertanyaan dalam kuesioner memenuhi syarat sah atau valid secara konten maupun isi dari apa yang ingin diukur. Apakah kuesioner secara konten sudah mewakili obyek yang ingin diamati, dalam hal ini apakah secara konten butir-butir pertanyaannya memang berkaitan dengan motivasi dan kepuasan sesuai dengan obyek yang ingin diamati sebagai dasar untuk dijadikan sebagai data utama penelitian.

Sebagai data awal, kuesioner diberikan kepada 61 responden. Kuesioner yang disebarkan terdiri dari pertanyaan tertutup mengenai aspek-aspek yang diamati yaitu Pembudayaan Anti Korupsi, yang terdiri dari 34 pertanyaan.

Nilai semua pertanyaan Variabel Pembudayaan Anti Korupsi sebanyak 34 pertanyaan mempunyai nilai Corrected Item-Total Correlation di atas 0,3 berarti semua pertanyaan yang diajukan memenuhi syarat sah atau valid secara konten maupun isi dari apa yang ingin diukur.

2. Uji Reliabilitas Pencegahan Korupsi

Realibilitas (keandalan) suatu alat ukur dapat di uji dengan skor yang dihasilkan relatif sama pada semua responden, walaupun responden tersebut mengerjakannya dalam waktu berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha atau Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Hasil pengujian reabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Uji Reliabilitas Variabel Pencegahan Korupsi

Tabel 3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.980	24

Dari hasil pengujian realibilitas ini dengan *Cronbach's Alpha* untuk semua atribut yaitu $r > 0.9$, artinya kuesioner tersebut reliabel dengan nilai reliabilitas kuesioner yang tinggi karena berada pada range 0.8-1.0. hal ini membuktikan bahwa kuesioner yang disebarkan dapat diandalkan untuk dijadikan alat ukur dalam penelitian ini.

b. Uji Validitas Variabel Pencegahan Korupsi

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat mewakili obyek yang diamati. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Korelasi Product Moment* dan hasilnya akan dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi r . Uji coba kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui apakah butir pertanyaan dalam kuesioner memenuhi syarat sah atau valid secara konten maupun isi dari apa yang ingin diukur. Apakah kuesioner secara konten sudah mewakili obyek yang ingin diamati, dalam hal ini apakah secara konten butir-butir pertanyaannya memang berkaitan dengan motivasi dan kepuasan sesuai dengan obyek yang ingin diamati sebagai dasar untuk dijadikan sebagai data utama penelitian.

Sebagai data awal, kuesioner diberikan kepada 61 responden. Kuesioner yang disebarkan terdiri dari pertanyaan tertutup mengenai aspek-aspek yang diamati yaitu Pencegahan Korupsi, yang terdiri dari 24 pertanyaan.

Nilai semua pertanyaan Variabel Pencegahan Korupsi sebanyak 24 pertanyaan mempunyai nilai Corrected Item-Total Correlation di atas 0,3 berarti semua pertanyaan yang diajukan memenuhi syarat sah atau valid secara konten maupun isi dari apa yang ingin diukur.

C. Analis Korelasi

Analisa Korelasi Variabel Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dengan Variabel Pencegahan Korupsi menggunakan **Uji Korelasi Pearson**.

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r).

Jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Jika nilai Signifikansi < 0.05 , maka berkorelasi

Jika nilai Signifikansi > 0.05 , maka tidak berkorelasi

Adapun Pedoman Derajat Hubungan sebagai berikut:

Nilai Pearson Correlation 0.00 s.d. 0.20 = tidak ada korelasi

Nilai Pearson Correlation 0.21 s.d. 0.40 = korelasi rendah

Nilai Pearson Correlation 0.41 s.d. 0.60 = korelasi sedang

Nilai Pearson Correlation 0.61 s.d. 0.80 = korelasi kuat

Nilai Pearson Correlation 0.81 s.d. 1.00 = korelasi sempurna.

Adapun hasil analisis Korelasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Terdapat hubungan antar variabel X (pembudayaan anti korupsi) dan Y (pencegahan korupsi) yang bersifat positif. Dasar Pengambilan Keputusan adalah hasil korelasi dengan nilai Signifikasi <0.05 , maka berkorelasi antara Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dengan Pencegahan Korupsi di PPSDM Aparatur. Dapat diartikan bahwa variabel pembudayaan anti korupsi berkorelasi atau berhubungan positif dengan variabel Pencegahan korupsi.

Adapun Pedoman Derajat Hubungan sebagai berikut:

Tidak terdapat Nilai Pearson Correlation 0.00 s.d. 0.20 = tidak ada korelasi, dan hanya 1 pertanyaan nomor 40 bernilai Pearson Correlation 0.21 s.d. 0.40 = korelasi rendah, sedangkan yang terbanyak dengan Nilai Pearson Correlation 0.41 s.d. 0.60 = korelasi sedang dan Nilai Pearson Correlation 0.61 s.d. 0.80 = korelasi kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap hubungan yang terjadi antara dua variable yaitu Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi dengan Pencegahan Korupsi dengan lokus di PPSDM Aparatur. Dalam Penelitian ini telah ditemukan proses Pembudayaan Anti Korupsi dan proses pencegahan korupsi dalam Pencegahan Korupsi di PPSDM Aparatur yang menjadi tujuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode explanatif, jenis datanya kuantitatif, sampel ditentukan berdasarkan metode Slovin dengan teknik pengumpulan data melalui angket/kuesioner sedangkan analisis data dengan melakukan analisis dekriptif, uji validitas dan realibilitas serta analisis korelasi. Hipotesis penelitian ini diterima yaitu semakin optimal pembudayaan gerakan anti korupsi maka semakin efektif pencegahan korupsi di PPSDM Aparatur yang berarti terdapat hubungan positif antara variabel pembudayaan gerakan anti korupsi dengan nilai variabel pencegahan korupsi terbanyak dengan Nilai Pearson Correlation 0.41 s.d. 0.60 = korelasi sedang dan Nilai Pearson Correlation 0.61 s.d. 0.80 = korelasi kuat.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
- Alatas, Syed Hussein, 1986, Sosiologi Korupsi, Jakarta, LP3S.
- Friedman, Lawrence.M, 1975, The Legal System, A Social Perspective, Newyork, Rusel Sage Foundation.
- Masdiana Erlangga, 26 Agustus 1999, Korupsi Dalam Wajah Politik Kekuasaan, Jakarta, Kompas.
- Muladi, tanpa tahun, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponogoro.
- Nawawi, Barda Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Neltje, Jeane Saly, Maret 2007, Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.
- Ubbe, Ahmad, Maret 2007, Implikasi Putusan Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.
- Aprillani Arsyad, SH. MH., Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, sumber dari internet (<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/201>).